

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, propinsi, dan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance budget*). Reformasi manajemen keuangan daerah mulai dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perubahan pertama yang dilakukan sebagai langkah reformasi keuangan adalah merubah sistem penganggaran. Perubahan sistem penganggaran meliputi perubahan proses penganggaran dan struktur anggaran. Perubahan proses penganggaran terkait dengan perubahan proses penyusunan anggaran yang sebelumnya bersifat sentralis menjadi partisipatif. Jika sebelumnya program pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat, maka dengan otonomi luas dan nyata pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Struktur anggaran diubah dari struktur anggaran tradisional dengan pendekatan berimbang menjadi struktur anggaran baru dengan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penganggaran yang menekankan pencapaian hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBD dikaitkan dengan target kinerja terukur (Mahmudi,2009).

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah memerlukan perencanaan yang berkaitan dengan penyerapan anggaran. Komposisi belanja dan penyerapan anggaran tersebut merupakan perimbangan dan penyesuaian upaya secara logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) se tempat dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan publik.

Setiap anggaran dikaitkan dengan target kinerja yang hendak dicapai, terdapat indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan anggaran. Apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran ini tetap dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan tahun anggaran berikutnya yang masuk dalam kategori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002:22). Setiap pekerjaan yang dilakukan harus diukur bagaimana hasilnya dengan mengukur kinerja karyawan maupun badan atau perusahaannya agar bisa dievaluasi bagaimana untuk kedepannya.

Penganggaran berbasis kinerja membutuhkan sumber daya manusia yang berkompoten, kurangnya sumber daya manusia dapat menurunkan pendapatan atau

taget yang hendak dicapai oleh pemerintah dan kinerja pemerintah pun akan dinilai tidak baik, dan juga jika belanja daerah tinggi maka SiLPA yang diperoleh akan kecil.

Munawar (2006) menjelaskan evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri samapi kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab.

Pentingnya evaluasi anggaran untuk mengetahui perbandingan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Hasil evaluasi berguna untuk memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan terhadap bantuan yang diperuntukkan pemerintah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja adalah analisis rasio keuangan.

Analisis rasio merupakan cara untuk melihat bagaimana kinerja dan dapat mengungkapkan hubungan penting, menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio (Wild, Subramanyan, Hasley, 2004).

Hal ini sangat diperhatikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada agar pendapatan daerah Kota Padang tetap meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir yang berjudul:

# **Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mengevaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2014-2016.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melalui penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilihat dari perhitungan rasio keuangan tiga tahun belakangan (2014-2016) ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Mengetahui kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melalui penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang berdasarkan rasio keuangan.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

1. Bagi penulis
  - a. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang di pelajari di kuliah kedalam dunia kerja, sehingga mengetahui keadaan dunia kerja.
  - b. Dapat mengetahui tentang cara-cara, system dan teknologi yang digunakan di dalam dunia kerja.
  - c. Dapat memperoleh data yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas akhir.

## 2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

- a. Membantu kegiatan dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab Bapenda
- b. Menjalin hubungan baik antara BAPENDA dengan Universitas.

### 1.5 Bentuk Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini akan dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Kegiatan magang dilakukan dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 20 Februari 2017.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang dan manfaat kegiatan magang , tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan laporan magang.

#### BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori dasar sehubungan dengan permasalahan yang dibahas yakni Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Mengevaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2014-2016.



**BAB III :** Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum yang memuat sejarah berdirinya Badan Penadapatan Kota Padang, tujuan, struktur organisasi serta ruang lingkup kegiatannya.

**BAB IV :** Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Mengevaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2014-2016.”

**BAB V :** Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran oleh penulis berdasarkan pembahasan.

